

## ABSTRAK

Penulisan yang menggunakan metode penulisan yuridis normatif ini membahas mengenai perbuatan hukum, yaitu memperdagangkan barang hasil penyelundupan. Seperti yang kita ketahui, praktik-praktik memperdagangkan barang hasil penyelundupan masih banyak ditemukan di Indonesia seakan-akan praktik ini dianggap tidak bertentangan dengan hukum karena banyak orang memaklumi perbuatan ini. Padahal, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang serta diancam pidana. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 480 KUHP yang menjelaskan tentang penadahan. Kemudian, dalam Pasal 6, Pasal 35, Pasal 47 UU Perdagangan, dan Pasal 103 UU Kepabeanan yang menjelaskan tentang perdagangan barang hasil penyelundupan di bidang impor. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat dikenakan terhadap pelaku perdagangan barang hasil penyelundupan, seperti yang tertulis dalam KUHP, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dari peraturan-peraturan tersebut, diatur mengenai sanksi pidana yang menjadi pertanggungjawaban pelaku.

**Kata kunci:** Penyelundupan, Perdagangan, Kepabeanan.

**ABSTRACT**

*This normative juridical thesis mainly discusses legal action, that is trading smuggled goods. As we know it, some people who understand trading smuggled goods practices are still found in Indonesia as if it did not contradict with laws and regulations. Whereas, based on laws and regulations in Indonesia, that legal action is forbidden and can be subject to criminal sanctions. The provision in question is Article 480 of the Criminal Code which explains about detention. Then, in Article 6, Article 35, Article 47 of the Trade Law, and Article 103 of the Customs Law which describes the trade in smuggled goods in the import sector. Other than that, there are laws and regulations in Indonesia that can be used to penalize trading smuggled goods subjects, such as Criminal Code, Laws of the Republic of Indonesia Number 10 of 1995 jo. Laws of the Republic of Indonesia Number 10 of 2006 concerning Customs and Laws of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning Trade. That laws and regulations also regulate criminal sanctions for trading smuggled goods subjects.*

**Keyword:** *Smuggling, Trade, Customs.*